

**ANALISIS KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BOGOR
MENGGUNAKAN RATA-RATA GEOMETRIK DAN TIPOLOGI SKALOGRAM
TAHUN 2024**

***ANALYSIS OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX COMPONENTS IN BOGOR
DISTRICT USING GEOMETRIC MEAN AND SCALOGRAM TYPOLOGY
YEAR 2024***

Andrea Emma Pravitasari¹, Vely Brian Rosandi², Shinta Nasution³, Sarihon Banjarnahor⁴
^{1,2}IPB University, ³Bappedalitbang

¹andreaemma@apps.ipb.ac.id

²vrosandi@apps.ipb.ac.id

³nasutionshinta1000@gmail.com

⁴Email.honmarbun@gmail.com

ABSTRACT

The Human Development Index (HDI) is an important tool to measure the quality of life and human development in a region. This research aims to analyze the Human Development Index (HDI) of Bogor Regency in 2023-2024 and categorize regions per sub-district using geometric mean and typology scaling based on human development indicators. A quantitative descriptive approach was applied using secondary data from Bappedalitbang of Bogor Regency and the Central Bureau of Statistics (BPS). The results showed a positive trend of HDI growth in Bogor Regency from 2016-2024 with a stable annual compound growth rate (geometric mean analysis). However, the results of the scalogram analysis explained significant disparities between sub-districts in Bogor District, with Gunung Putri and Cibinong sub-districts at the top for HDI and supporting facilities, while sub-districts such as Sukajaya and Sukamakmur recorded low HDI and sub-district development index values. These findings suggest the need for more strategic policy interventions to reduce inter-regional disparities and improve the quality of life of people in disadvantaged areas.

Keywords: Human Development Index, Geometric Mean, Scalogram Typology, Region

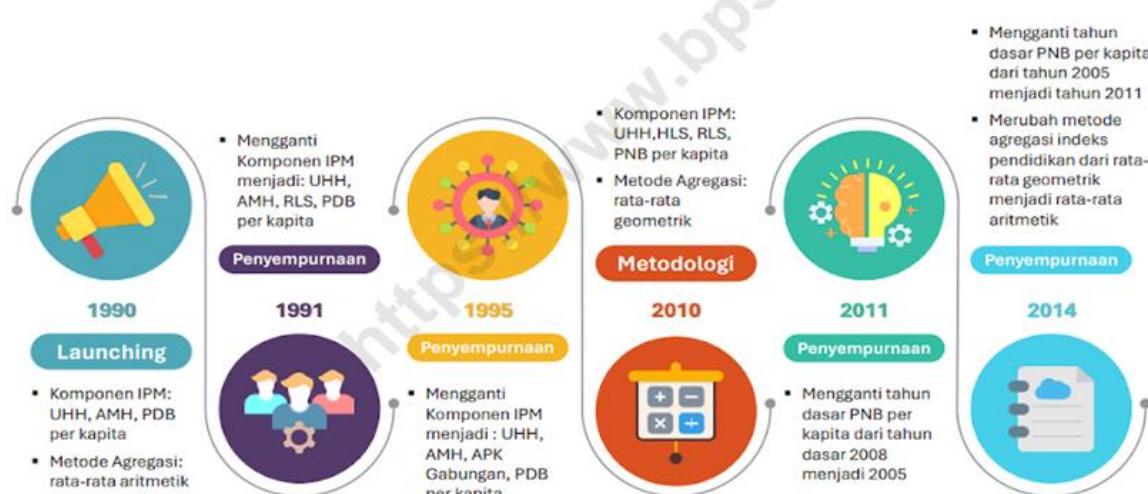
ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi alat penting untuk mengukur kualitas hidup dan pembangunan manusia di suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor tahun 2023-2024 dan mengkategorisasi wilayah per kecamatan menggunakan rata-rata geometrik dan tipologi skalogram berdasarkan indikator pembangunan manusia. Pendekatan deskriptif kuantitatif diterapkan dengan menggunakan data sekunder dari Bappedalitbang Kabupaten Bogor dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan tren positif pertumbuhan IPM Kabupaten Bogor tahun 2016-2024 dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan yang stabil (analisis rata-rata geometrik). Namun, hasil analisis scalogram menjelaskan adanya disparitas signifikan antar kecamatan di Kabupaten Bogor, dengan Kecamatan Gunung Putri dan Cibinong berada di posisi teratas untuk IPM dan fasilitas pendukung, sementara kecamatan seperti Sukajaya dan Sukamakmur mencatat nilai IPM dan indeks perkembangan kecamatan yang rendah. Temuan ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih strategis untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tertinggal.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Geometrik, Tipologi Skalogram, Wilayah

1. PENDAHULUAN

Laporan Pembangunan Manusia, yang diterbitkan setiap tahun sejak 1990 (UNDP, 1990), menjelaskan bahwa pembangunan manusia adalah tentang memperluas pilihan masyarakat untuk memastikan mereka mampu menjalani hidup yang panjang dan sehat, memiliki akses ke sumber daya untuk 'standar hidup yang layak', dan memiliki sarana untuk pengayaan budaya. Laporan-laporan ini telah menerbitkan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) setiap tahun untuk setiap negara. IPM telah memberikan peringkat negara-negara yang populer selama lebih dari seperempat abad. Meskipun konsep 'pembangunan manusia' tidak terukur dengan baik, IPM merupakan peningkatan konseptual yang hebat atas produk domestik bruto per orang yang sebelumnya umumnya menyatakan kemajuan suatu negara dari perspektif ekonomi yang sempit. dan kendala-kendalanya (misalnya, batas atas harapan hidup); jika nilainya diubah, maka indeks dan peringkatnya pun ikut berubah (Ravallion, 2012). Setiap indikator komponen penghitungan IPM dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) (BPS, 2021). IPM didasarkan pada tiga dimensi utama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. IPM memberikan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 1. Perkembangan Metodologi IPM oleh UNDP

Salah satu manfaat utama dari IPM adalah adanya keterbandingan antarnegara dalam hal kemajuan pembangunan manusia. Dengan membandingkan IPM antarnegara, perbedaan dalam kemajuan pembangunan manusia di seluruh dunia dapat dilihat dan dipahami dengan lebih mudah. Selain itu, IPM juga memungkinkan identifikasi masalah dan tantangan khusus yang dihadapi oleh negara tertentu dalam mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan perbedaan dan masalah tersebut, pembuat kebijakan dapat mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kemajuan pembangunan manusia di negara mereka. Layaknya manusia yang selalu berkembang, begitu pula pengukuran IPM mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Telah terjadi lima kali penyempurnaan terhadap IPM sejak tahun 1990. Penyempurnaan signifikan terjadi pada tahun

2010 yang utamanya terkait indikator-indikator penyusun IPM, sedangkan tahun 2014 terjadi perubahan metode penghitungan. Jika digambarkan, penyempurnaan pengukuran IPM dapat diamati melalui gambar 1.

Berdasarkan indikator HDI yang dipublikasikan PBB tahun 2022, rata-rata HDI dunia adalah 0,731, sementara Indonesia 0,707, berada pada urutan 111 dari 189 negara. HDI Indonesia meningkat 0,003 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun PBB menggolongkan Indonesia termasuk kelompok tinggi (0,7 – 0,8), namun jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN masih berada dibawah Singapura (9), Brunei (45), Malaysia (61), Thailand (77), dan Filipina (106). Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk terus berupaya meningkatkan HDI tersebut melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan.

Jika dilihat dari sebaran nilai IPM Indonesia tahun 2023, masih nampak terjadi kesenjangan (disparitas) antar wilayah provinsi dan kabupaten/kota, selama empat tahun disparitas yang terjadi baik kabupaten/kota dan provinsi berangsor mengalami penurunan setiap tahunnya. Disparitas kabupaten/kota turun jauh lebih cepat dibandingkan provinsi. Meskipun demikian, disparitas pembangunan manusia antarkabupaten/kota jauh lebih tinggi daripada antarprovinsi. Artinya, capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota jauh lebih beragam dibandingkan dengan di tingkat provinsi. Disparitas kabupaten/kota selama empat tahun sudah menurun 2,27 poin menjadi 50,93 pada tahun 2023. Sementara itu, disparitas provinsi sejak 2020 hanya turun sebesar 0,16 poin menjadi 20,54 pada tahun 2023. Pengukuran disparitas dilakukan dengan melakukan selisih antara nilai IPM tertinggi dan IPM terendah

Sejak tahun 2016, IPM Provinsi Jawa Barat telah berstatus “tinggi”, sementara selama periode 2010-2015 berstatus “sedang”. Pada tahun 2023, status IPM di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu “sedang”, “tinggi”, dan “sangat tinggi” (Gambar 9). Berdasarkan status IPM, Kabupaten Bogor tergolong “tinggi”, dengan IPM pada tahun 2023 sebesar 74,24 meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 73,63. Kabupaten Bogor tergolong dalam Kuadran IV menurut analisis tipologi Klassen, baik berdasarkan angka IPM dan pertumbuhan IPM, maupun ketika dianalisis menggunakan komponen penyusunnya seperti Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran. Kuadran IV menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki angka IPM dan komponen-komponennya yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini mengindikasikan tantangan signifikan dalam kinerja pembangunan manusia yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam pengembangan kebijakan yang lebih strategis dan efektif untuk memperbaiki indikator tersebut.

Gambaran ini menegaskan perlunya pendekatan analisis yang lebih rinci dan berbasis wilayah untuk memahami kontribusi masing-masing kecamatan terhadap kinerja keseluruhan Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, analisis skalogram dapat menjadi langkah lanjutan yang relevan untuk menggantikan tipologi Klassen. Skalogram memungkinkan evaluasi hierarki dan tingkat perkembangan setiap kecamatan berdasarkan indikator yang lebih spesifik, seperti akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan sejumlah studi sebelumnya yang sama-sama menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Namun, pendekatan yang digunakan dalam studi ini lebih luas karena tidak hanya

mengamati IPM sebagai satu indikator agregat, melainkan juga membedah komponen-komponen pembentuknya seperti rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), angka harapan hidup (AHH), dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP). Selain itu, kajian ini juga memperluas cakupan analisis pada indeks perkembangan kecamatan (IPK) yang terdiri atas indeks fasilitas pendidikan (IFP), indeks fasilitas kesehatan (IFK), dan indeks fasilitas ekonomi (IFE).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan faktor dominan dalam meningkatkan IPM. Penelitian terdahulu dengan menggunakan model regresi logistik biner dan menemukan bahwa faktor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia (Aliu et al., 2024). Sementara itu, penelitian lainnya di Provinsi Papua Barat mengungkapkan bahwa pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup, dengan pendekatan regresi linier berganda (Matulessy et al., 2025). Di tingkat kabupaten, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan erat dengan IPM di Kabupaten Bojonegoro (Primandhana et al., 2021). Hal ini mempertegas pentingnya pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan faktor makroekonomi secara lokal. Dari sisi metodologi, penelitian lain menawarkan pendekatan alternatif menggunakan regresi nonparametrik spline, yang mampu menangkap pola nonlinier antara faktor-faktor sosial ekonomi dan IPM secara lebih fleksibel (Alwi & Musfirah, 2018). Selanjutnya dengan penelitian dengan pendekatan regresi logistik ordinal dan probit ordinal dapat mengidentifikasi perbedaan kontribusi setiap faktor terhadap kategori IPM secara lebih terstruktur (Sudarno et al., 2017). Selain itu, kajian oleh Utomo dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa variabel makroekonomi seperti pengeluaran pemerintah, konsumsi masyarakat, dan nilai tukar berpengaruh terhadap inflasi, yang secara tidak langsung memengaruhi daya beli dan kualitas hidup masyarakat, serta berimplikasi terhadap pembangunan manusia (Utomo & Nugroho, 2022). Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi tambahan dalam melihat ketimpangan pembangunan manusia secara spasial pada tingkat kecamatan, serta memberikan arah kebijakan berbasis data yang lebih tajam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis IPM di Kabupaten Bogor, dengan fokus pada kontribusi indikator komponen IPM di setiap kecamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Bappedalitbang Kabupaten Bogor (Laporan IPM Tahun 2024), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor (Kabupaten Bogor dalam Angka tahun 2024), serta studi literatur terkait dengan metode Rata-rata Geometrik dan Tipologi Skalogram.

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pendekatan rata-rata geometrik terhadap tiga komponen utama, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Masing-masing komponen dihitung terlebih dahulu menggunakan rumus tertentu. Indeks kesehatan dihitung berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang telah distandardisasi. Indeks pendidikan disusun dari dua sub-komponen, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang masing-masing distandardisasi dan

kemudian dirata-ratakan secara aritmatika sebelum digabungkan dalam penghitungan IPM. Selanjutnya, indeks pengeluaran dihitung berdasarkan Paritas Daya Beli atau pengeluaran per kapita (PPP) yang telah disesuaikan dan distandardisasi. Setelah ketiga indeks ini diperoleh, IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari ketiganya. Hasil IPM kemudian diklasifikasikan dalam lima kategori, yaitu sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan rendah ($IPM < 60$).

Teknik skalogram merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan suatu wilayah atau kecamatan berdasarkan kelengkapan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas, yang pada akhirnya dapat menentukan hierarki pusat pertumbuhan dan wilayah hinterland. Wilayah dengan fasilitas relatif lengkap serta aksesibilitas yang memadai dikategorikan sebagai pusat pelayanan, sedangkan wilayah dengan kondisi sebaliknya disebut wilayah hinterland. Penelitian ini menggunakan dua titik waktu, yaitu tahun 2016 dan 2022, serta menggunakan Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) sebagai indikator alternatif pengganti PDRB karena mempertimbangkan jumlah fasilitas dan jumlah penduduk. Fasilitas yang dimaksud meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan layanan pemerintahan. Analisis scalogram dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: pertama, menghitung bobot indeks karakteristik (I_{ij}) berdasarkan jumlah fasilitas pada tiap wilayah; kedua, melakukan standarisasi data dengan menghitung nilai K_i berdasarkan nilai minimum dan standar deviasi dari fasilitas yang dianalisis; dan ketiga, menghitung nilai IPK sebagai hasil akhir untuk menentukan klasifikasi perkembangan wilayah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. *Analisis Nilai IPM Kabupaten Bogor dan Komponen Penyusunnya Menggunakan Rata Geometrik*

Analisis Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor beserta komponen penyusunnya menjadi kajian penting dalam memahami dinamika pembangunan daerah. Dengan pendekatan rata-rata geometrik bertujuan untuk menggali pola pertumbuhan IPM secara lebih mendalam serta mengevaluasi kontribusi masing-masing dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam menentukan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memberikan gambaran akurat mengenai tren IPM, tetapi juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi percepatan atau perlambatan pembangunan manusia di Kabupaten Bogor.

a) *Nilai IPM Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2016-2023*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bogor menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2016 hingga 2023, berdasarkan data rata-rata kecamatan yang dihitung dengan berbagai metode. IPM berdasarkan rumus BPS mencatat kenaikan dari 67,83 pada tahun 2016 menjadi 72,65 pada tahun 2023, yang mencerminkan perbaikan signifikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Setelah dilakukan koreksi, rata-rata IPM kecamatan menunjukkan angka yang lebih optimistis, dimulai dari 68,32 pada tahun 2016 hingga mencapai 73,02 pada tahun 2023. Metode sebelum koreksi menghasilkan nilai yang lebih rendah, yaitu dari 65,47 pada tahun 2016 menjadi 68,82 pada tahun 2023, yang

mengindikasikan adanya disparitas antar wilayah yang memerlukan perhatian lebih.

IPM Kabupaten Bogor versi resmi BPS menunjukkan pola serupa dengan hasil koreksi rata-rata kecamatan, dimulai dari 68,32 pada tahun 2016 hingga 73,02 pada tahun 2023. Konsistensi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang mencakup dimensi penting seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat. Meski demikian, perbedaan hasil antar metode menunjukkan perlunya penyempurnaan dalam penghitungan untuk mencerminkan kondisi riil di tingkat kecamatan secara lebih akurat. Tren positif ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bogor. Namun, tantangan seperti disparitas antar kecamatan dan akses terhadap layanan dasar di wilayah terpencil perlu menjadi fokus untuk memastikan pembangunan yang lebih merata.

Tabel 1. Nilai IPM Rumus BPS, Corrected, Before Corrected, dan Versi BPS Tahun 2016-2023

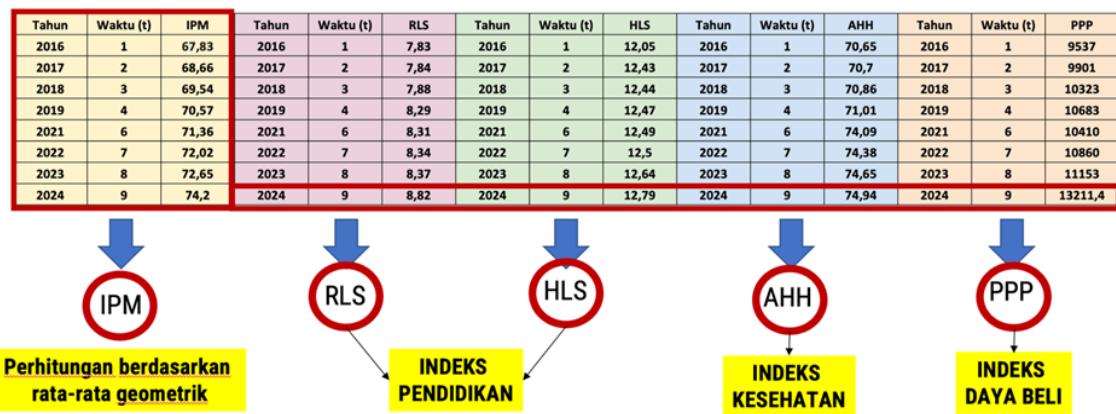
| NILAI IPM | IPM_16 | IPM_17 | IPM_18 | IPM_19 | IPM_21 | IPM_22 | IPM_23 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RATA-RATA IPM KEC. (RUMUS BPS) | 67.83 | 68.66 | 69.54 | 70.57 | 71.36 | 72.02 | 72.65 |
| RATA-RATA IPM KEC. (CORRECTED) | 68.32 | 69.13 | 69.69 | 70.65 | 71.83 | 72.43 | 73.02 |
| RATA-RATA IPM KEC. (BEFORE CORRECTED) | 65.47 | 66.09 | 69.78 | 69.92 | 67.73 | 68.61 | 68.82 |
| IPM KAB. BOGOR (VERSI BPS) | 68.32 | 69.13 | 69.69 | 70.65 | 71.83 | 72.43 | 73.02 |

b) Nilai IPM Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2024

Tabel di atas menggambarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor dari tahun 2016 hingga 2024, beserta komponen utama yang menyusunnya, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Nilai IPM menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 67,83 pada tahun 2016 menjadi 74,2 pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan adanya keberhasilan dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga dimensi utama. Dalam dimensi pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,83 tahun pada 2016 menjadi 8,82 tahun pada 2024, yang didukung oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) yang juga meningkat dari 12,05 tahun menjadi 12,79 tahun. Perbaikan ini menunjukkan semakin baiknya akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal.

Pada dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat dari 70,65 tahun pada 2016 menjadi 74,94 tahun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, serta upaya pengurangan angka kematian ibu dan anak. Sementara itu, pada dimensi daya beli, Pengeluaran Per Kapita (PPP) mengalami peningkatan signifikan dari Rp9.537 pada tahun 2016 menjadi Rp13.211,4 pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta program pengentasan kemiskinan.

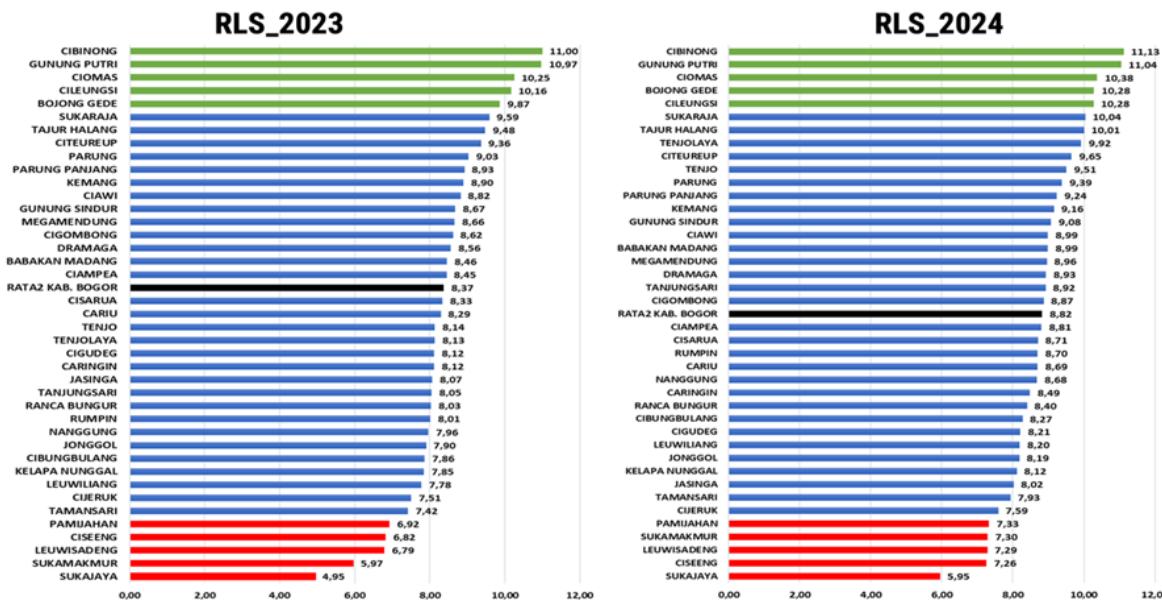
Tabel 2. Pendugaan Nilai IPM Kabupaten Bogor Tahun 2024 Menggunakan Growth and Decay Model



c) Perbandingan Nilai Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023-2024

Data yang ditampilkan pada grafik menggambarkan perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bogor untuk masing-masing kecamatan pada tahun 2023 dan 2024. Grafik ini mencerminkan adanya disparitas yang signifikan antara kecamatan dengan RLS tertinggi dan terendah, sekaligus memberikan gambaran tentang dinamika pendidikan di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2023, Kecamatan Cibinong mencatat RLS tertinggi sebesar 11,00 tahun, diikuti oleh Gunung Putri dengan 10,97 tahun, Ciomas dengan 10,25 tahun, dan Cileungsi sebesar 10,16 tahun. Wilayah ini tetap menunjukkan keunggulan pada tahun 2024, dengan Cibinong mengalami peningkatan menjadi 11,13 tahun, Gunung Putri menjadi 11,04 tahun, Ciomas 10,38 tahun, dan Cileungsi 10,28 tahun. Wilayah ini umumnya merupakan pusat-pusat perkotaan dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan formal, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi akan pentingnya pendidikan.

Di sisi lain, kecamatan seperti Sukajaya, Sukamakmur, Leuwisadeng, dan Ciseeng memiliki RLS yang jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Pada tahun 2023, Sukajaya mencatat RLS terendah sebesar 4,95 tahun, diikuti oleh Sukamakmur dengan 5,97 tahun, Leuwisadeng 6,79 tahun, dan Ciseeng 6,82 tahun. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2024, wilayah-wilayah ini masih berada di posisi terbawah dengan Sukajaya meningkat menjadi 5,95 tahun, Sukamakmur 7,30 tahun, Leuwisadeng 7,29 tahun, dan Ciseeng 7,26 tahun. Rendahnya RLS di wilayah-wilayah ini kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pendidikan, tantangan geografis seperti lokasi yang terpencil, dan keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan formal. Hal ini juga menunjukkan adanya kesenjangan regional yang signifikan antara kecamatan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Bogor.



Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 1. Nilai Rata-Rata Lama Sekolah 40 Kecamatan Tahun 2023-2024

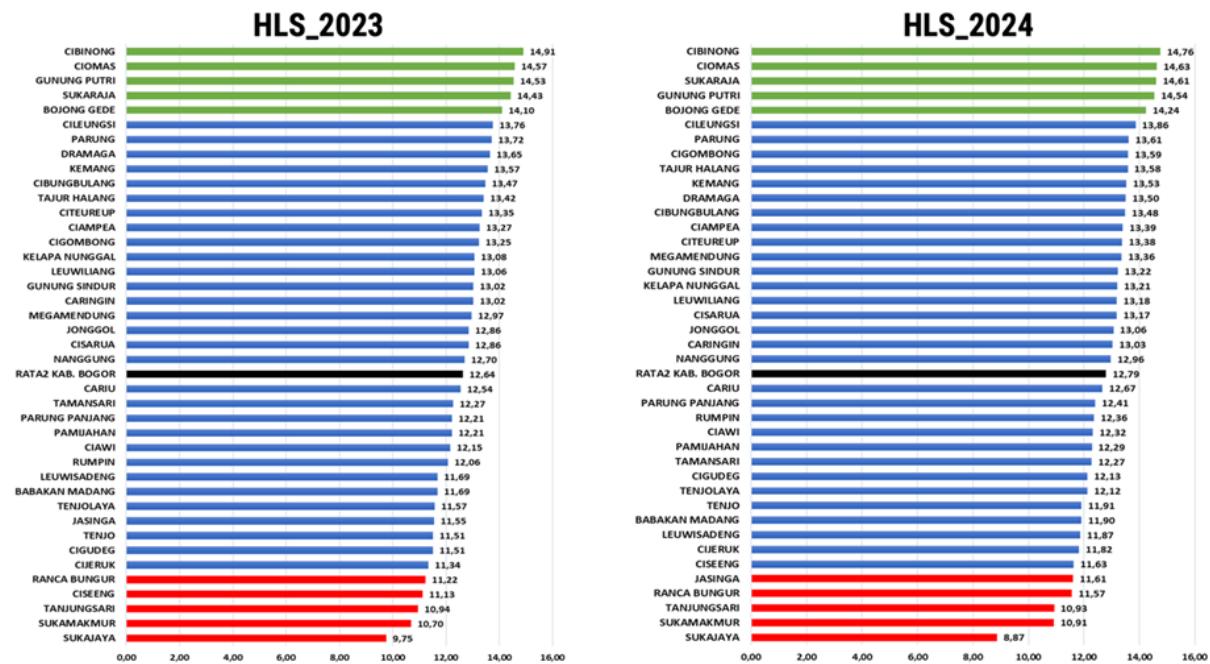
Kecamatan dengan RLS menengah seperti Bojong Gede, Sukaraja, Tajur Halang, dan Citeureup mencatat nilai RLS berkisar antara 9 hingga 9,87 tahun pada tahun 2023, yang meningkat menjadi 9,92 hingga 10,28 tahun pada tahun 2024. Wilayah-wilayah ini menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik dan cenderung stabil, mencerminkan adanya dampak positif dari pembangunan infrastruktur pendidikan dan program pemerintah yang difokuskan pada peningkatan akses pendidikan di daerah suburban. Secara keseluruhan, rata-rata RLS Kabupaten Bogor tercatat sebesar 8,37 tahun pada 2023 dan meningkat menjadi 8,82 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam memperbaiki kualitas pendidikan di tingkat kabupaten. Namun, kesenjangan antar wilayah masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh kecamatan. Wilayah perkotaan dengan RLS tinggi cenderung lebih maju karena memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan formal, sementara kecamatan dengan RLS rendah seperti Sukajaya dan Sukamakmur membutuhkan perhatian khusus. Upaya untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah-wilayah terpencil, seperti membangun sekolah baru, memperbaiki infrastruktur jalan, memberikan beasiswa, dan melibatkan masyarakat dalam program pendidikan, perlu menjadi prioritas.

d) Perbandingan Nilai Harapan Lama Sekolah Tahun 2023-2024

Data Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perbedaan signifikan antara kecamatan dengan capaian tertinggi dan terendah. HLS mencerminkan tingkat optimisme masyarakat terhadap akses dan kesempatan pendidikan di masa depan. Kecamatan Cibinong secara konsisten memimpin dengan HLS tertinggi sebesar 14,91 tahun pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 14,76 tahun pada 2024. Wilayah ini diikuti oleh Ciomas (14,57 tahun pada 2023 menjadi 14,63 tahun pada 2024), Gunung Putri (14,53 tahun pada 2023 menjadi 14,61 tahun pada 2024), dan Sukaraja (14,43 tahun pada 2023 menjadi 14,54 tahun pada 2024). Kecamatan-kecamatan ini merupakan wilayah yang memiliki

akses pendidikan yang lebih baik, ketersediaan fasilitas memadai, serta kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan, yang menjadikannya unggul dalam indikator ini.

Wilayah dengan HLS menengah, seperti Bojong Gede, Cileungsi, Parung, dan Dramaga, mencatat nilai HLS antara 13,00 hingga 14,10 tahun pada tahun 2023, yang meningkat pada tahun 2024 dengan rentang 13,24 hingga 14,24 tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya keberlanjutan program pembangunan pendidikan di daerah suburban, yang mampu memberikan akses pendidikan yang cukup baik bagi penduduknya. Tren positif ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan mulai memberikan hasil, meskipun belum sepenuhnya merata.



Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 2. Nilai Harapan Lama Sekolah 40 Kecamatan Tahun 2023-2024

Sebaliknya, kecamatan seperti Sukajaya, Sukamakmur, Tanjungsari, dan Ciseeng menunjukkan HLS yang jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Pada tahun 2023, Sukajaya mencatat nilai HLS terendah sebesar 9,75 tahun, meningkat menjadi 10,91 tahun pada 2024. Sukamakmur, meskipun mengalami peningkatan dari 10,70 tahun pada 2023 menjadi 10,93 tahun pada 2024, tetap berada di posisi terbawah. Wilayah seperti Tanjungsari (11,57 tahun pada 2024) dan Ciseeng (11,61 tahun pada 2024) juga berada di bawah rata-rata kabupaten. Rendahnya HLS di wilayah-wilayah ini dapat disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pendidikan, lokasi geografis yang terpencil, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

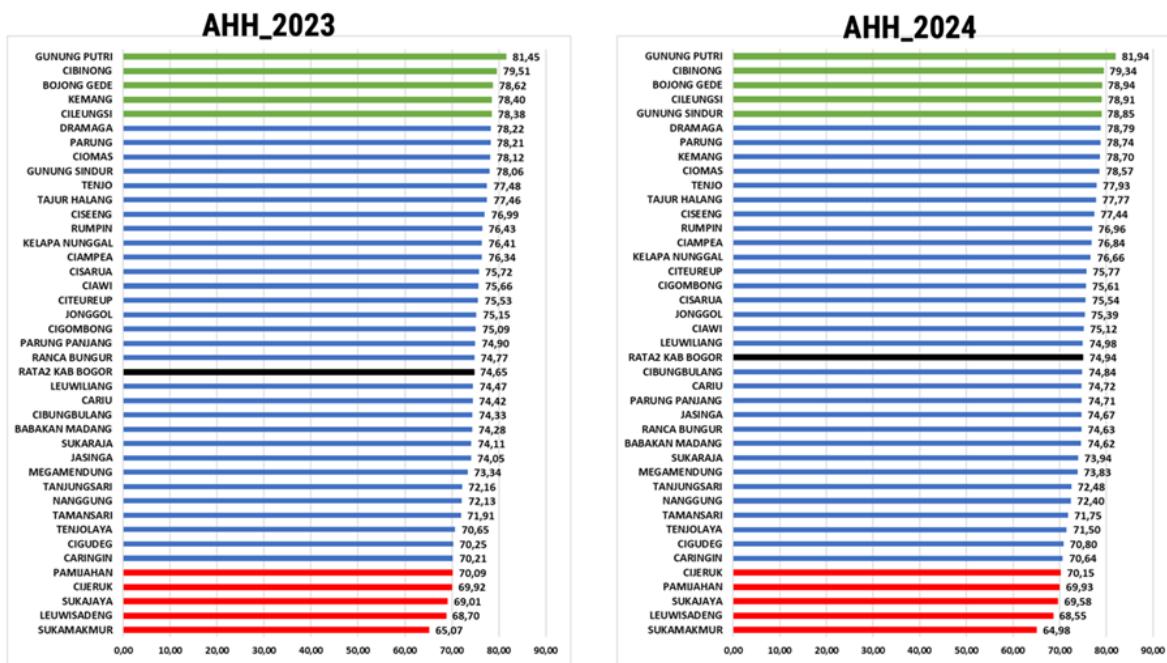
Rata-rata HLS Kabupaten Bogor meningkat dari 12,64 tahun pada 2023 menjadi 12,79 tahun pada 2024. Meskipun peningkatan ini menunjukkan adanya progres, kesenjangan yang signifikan antara kecamatan dengan HLS tertinggi dan terendah menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Kecamatan perkotaan dengan akses yang baik terhadap pendidikan formal terus menunjukkan keunggulan, sedangkan kecamatan pedesaan dan terpencil tertinggal jauh, mencerminkan ketimpangan dalam pemerataan akses pendidikan.

e) *Perbandingan Nilai Angka Harapan Hidup Tahun 2023-2024*

Data Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih terdapat kesenjangan yang signifikan antar kecamatan. Kecamatan Gunung Putri mencatat AHH tertinggi pada tahun 2023 sebesar 81,45 tahun, diikuti oleh Cibinong dengan 79,51 tahun, Bojong Gede dengan 78,62 tahun, dan Kemang sebesar 78,40 tahun. Pada tahun 2024, wilayah ini terus mempertahankan posisi teratas, dengan Gunung Putri mengalami peningkatan menjadi 81,94 tahun, diikuti oleh Cibinong dengan 79,34 tahun, serta Bojong Gede dan Kemang yang masing-masing mencatat 78,94 tahun dan 78,91 tahun. Tingginya AHH di kecamatan-kecamatan ini mencerminkan keunggulan dalam akses terhadap layanan kesehatan, ketersediaan fasilitas medis yang memadai, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan pola hidup sehat.

Di sisi lain, kecamatan seperti Sukamakmur, Sukajaya, Leuwisadeng, dan Cijeruk mencatat AHH terendah di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2023, AHH di wilayah ini masing-masing adalah 65,07 tahun, 68,70 tahun, 69,01 tahun, dan 70,09 tahun, yang meningkat tipis pada tahun 2024 menjadi 64,98 tahun, 69,58 tahun, 68,55 tahun, dan 70,15 tahun. Kecamatan-kecamatan ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, infrastruktur yang tidak memadai, serta kendala sosial ekonomi yang membatasi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Disparitas ini menjadi tantangan serius dalam pemerataan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bogor.

Secara keseluruhan, rata-rata AHH Kabupaten Bogor meningkat dari 74,75 tahun pada 2023 menjadi 74,98 tahun pada 2024, mencerminkan adanya progres positif dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, kesenjangan antar wilayah tetap menjadi masalah utama yang perlu segera diatasi. Wilayah perkotaan seperti Gunung Putri dan Cibinong terus menunjukkan keunggulan dibandingkan wilayah pedesaan seperti Sukajaya dan Sukamakmur, yang mencerminkan perlunya intervensi yang lebih terfokus di wilayah-wilayah tertinggal. Untuk mengurangi disparitas ini, perlu mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan, memperluas program layanan kesehatan bersubsidi, serta meningkatkan aksesibilitas infrastruktur seperti jalan menuju fasilitas kesehatan. Selain itu, program edukasi kesehatan, seperti promosi pola hidup sehat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit, harus lebih diperluas di wilayah dengan AHH rendah.



Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 3. Nilai Angka Harapan Hidup 40 Kecamatan Tahun 2023-2024

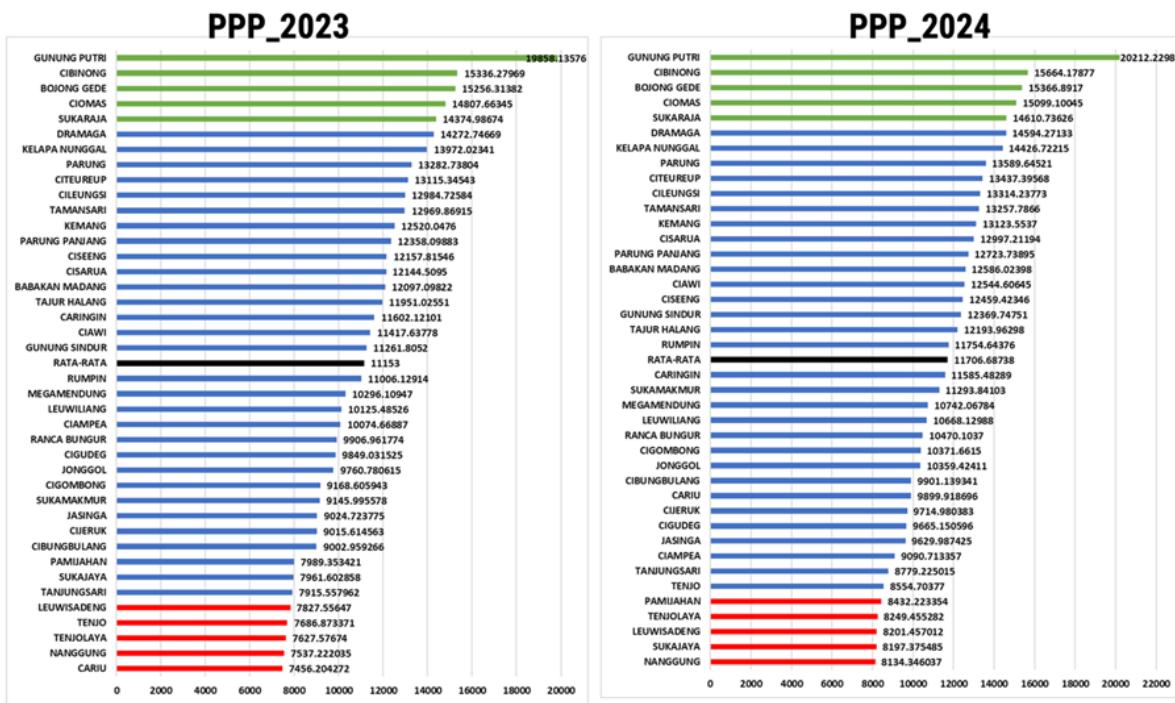
f) *Perbandingan Nilai Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023-2024*

Data Pengeluaran Per Kapita (PPP) di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat secara keseluruhan, meskipun disparitas antar kecamatan masih sangat mencolok. Kecamatan Gunung Putri memimpin dengan PPP tertinggi pada tahun 2023 sebesar 15.336,28 rupiah, diikuti oleh Cibinong (15.256,31 rupiah), Bojong Gede (14.807,66 rupiah), dan Ciomas (14.374,99 rupiah). Pada tahun 2024, kecamatan-kecamatan ini tetap berada di posisi tertinggi, dengan Gunung Putri mencapai 20.212,23 rupiah, diikuti oleh Cibinong (15.664,18 rupiah), Bojong Gede (15.566,89 rupiah), dan Ciomas (15.099,10 rupiah). Tingginya nilai PPP di wilayah ini menunjukkan keunggulan dalam hal akses infrastruktur, peluang kerja, dan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang, menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor.

Kecamatan dengan PPP menengah seperti Sukaraja, Dramaga, Kelapa Nunggal, dan Parung menunjukkan nilai PPP berkisar antara 12.000 hingga 14.000 rupiah pada 2023 dan meningkat menjadi 13.500 hingga 14.900 rupiah pada 2024. Wilayah-wilayah ini mencerminkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lokal yang cukup baik, didorong oleh pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi berbasis komunitas. Sementara itu, kecamatan seperti Cariu, Nanggung, Tenjolaya, dan Leuwisadeng mencatat nilai PPP terendah pada 2023, masing-masing sebesar 7.456,20 rupiah, 7.537,22 rupiah, 7.627,58 rupiah, dan 7.827,56 rupiah, yang meningkat pada 2024 menjadi 8.134,35 rupiah, 8.197,38 rupiah, 8.249,46 rupiah, dan 8.554,70 rupiah. Rendahnya PPP di kecamatan ini menunjukkan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi, infrastruktur yang belum memadai, dan minimnya investasi yang masuk ke wilayah tersebut.

Rata-rata PPP Kabupaten Bogor meningkat dari 11.153 rupiah pada 2023 menjadi 11.706 rupiah pada 2024, menunjukkan tren positif dalam peningkatan daya beli masyarakat secara

keseluruhan. Namun, kesenjangan antar kecamatan tetap menjadi tantangan besar, dengan kecamatan-kecamatan perkotaan seperti Gunung Putri dan Cibinong terus mendominasi, sementara kecamatan pedesaan seperti Cariu dan Nanggung tertinggal jauh.



Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 4. Nilai Pengeluaran Per Kapita 40 Kecamatan Tahun 2023-2024

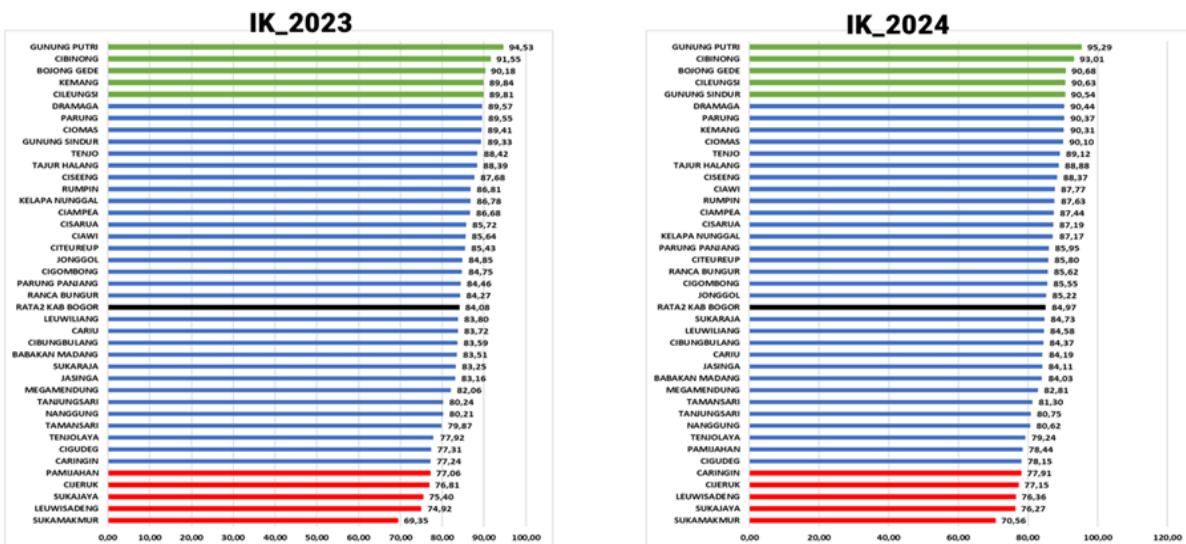
g) Perbandingan Nilai Indeks Kesehatan Tahun 2023-2024

Data Indeks Kesehatan (IK) di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan tren peningkatan pada sebagian besar kecamatan, meskipun kesenjangan antar wilayah masih menjadi tantangan yang signifikan. Kecamatan Gunung Putri mencatat nilai IK tertinggi pada tahun 2023 sebesar 94,53, diikuti oleh Cibinong (91,55), Bojong Gede (90,18), dan Kemang (89,84). Pada tahun 2024, wilayah ini terus mempertahankan posisi teratas dengan peningkatan nilai IK, dimana Gunung Putri mencapai 95,29, Cibinong 93,01, Bojong Gede 90,68, dan Ciomas 90,54. Kecamatan-kecamatan ini menunjukkan keunggulan dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, ketersediaan fasilitas medis yang memadai, dan program kesehatan masyarakat yang efektif, didukung oleh lokasi strategis serta infrastruktur kesehatan yang berkembang baik.

Di sisi lain, kecamatan seperti Dramaga, Parung, Cileungsi, dan Gunung Sindur memiliki nilai IK pada kisaran 85 hingga 90 pada tahun 2023, yang meningkat menjadi 87 hingga 90 pada tahun 2024. Wilayah-wilayah ini menunjukkan stabilitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan kesehatan masyarakat, yang mencakup keberhasilan program kesehatan dasar seperti imunisasi, layanan ibu dan anak, serta peningkatan akses terhadap air bersih. Meskipun berada pada kategori menengah, wilayah-wilayah ini memiliki potensi untuk terus berkembang dengan dukungan pembangunan yang konsisten.

Sebaliknya, kecamatan-kecamatan seperti Sukamakmur, Sukajaya, Leuwisadeng, dan Cijeruk mencatat nilai IK terendah. Pada tahun 2023, Sukamakmur memiliki IK sebesar 69,35,

sementara Sukajaya, Leuwisadeng, dan Cijeruk masing-masing mencatat nilai 75,40, 74,92, dan 77,24. Pada tahun 2024, meskipun terjadi peningkatan kecil, wilayah-wilayah ini tetap berada di posisi terbawah, dengan Sukamakmur meningkat menjadi 70,56, Sukajaya menjadi 76,27, Leuwisadeng menjadi 76,36, dan Cijeruk menjadi 77,15. Rendahnya nilai IK di kecamatan-kecamatan ini menunjukkan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis, serta infrastruktur yang tidak memadai, terutama di wilayah terpencil. Rata-rata IK Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari 84,75 pada tahun 2023 menjadi 84,97 pada tahun 2024. Meskipun peningkatan ini mencerminkan progres positif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, disparitas yang mencolok antara kecamatan perkotaan seperti Gunung Putri dan Cibinong dengan kecamatan pedesaan seperti Sukamakmur dan Sukajaya menjadi tantangan yang harus diatasi. Untuk mengurangi kesenjangan ini, diperlukan pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah tertinggal, penyediaan tenaga medis yang memadai, dan pengembangan program berbasis teknologi seperti telemedicine untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, edukasi kesehatan yang intensif kepada masyarakat di wilayah dengan IK rendah perlu ditingkatkan untuk mendorong perilaku hidup sehat dan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dasar.



Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 5. Nilai Indeks Kesehatan 40 Kecamatan Tahun 2023-2024

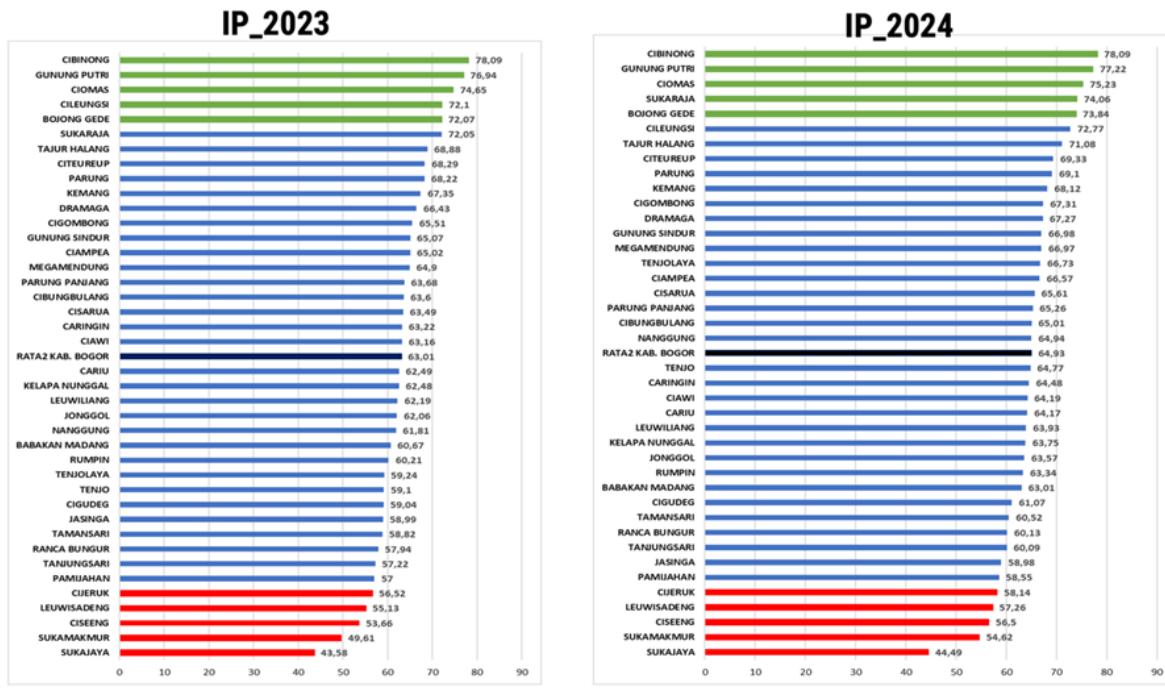
h) Perbandingan Nilai Indeks Pendidikan Tahun 2023-2024

Berdasarkan grafik indeks pendidikan (IP) untuk tahun 2023 dan 2024, terlihat adanya pola perubahan yang memberikan gambaran tentang kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor, baik dari segi pemerataan maupun peningkatan kualitas. Kecamatan Cibinong tetap menjadi kecamatan dengan indeks pendidikan tertinggi, dengan skor yang stabil di angka 78,09 pada kedua tahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan di kecamatan tersebut sudah relatif mapan dan berkelanjutan. Kecamatan Gunung Putri mengikuti di posisi kedua, mengalami peningkatan kecil dari 76,94 pada tahun 2023 menjadi 77,22 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya komitmen untuk mempertahankan kualitas pendidikan di wilayah ini.

Kecamatan-kecamatan lain yang berada di peringkat atas, seperti Ciomas, Bojong Gede,

dan Sukaraja, juga menunjukkan kinerja yang baik dengan skor yang tetap tinggi, meskipun pergerakan angkanya tidak signifikan. Hal ini menandakan bahwa fasilitas pendidikan di wilayah-wilayah ini telah memadai, didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten, dan tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi di kalangan masyarakat. Kecamatan Tajur Halang dan Citeureup juga menunjukkan skor yang mendekati rata-rata kecamatan dengan indeks pendidikan tinggi, yang mengindikasikan tren positif dalam perkembangan pendidikan.

Di sisi lain, kecamatan dengan indeks pendidikan terendah seperti Sukajaya, Sukamakmur, Leuwisadeng, dan Ciseeng masih menunjukkan skor yang jauh di bawah rata-rata kabupaten, yaitu 64,93 pada tahun 2024. Misalnya, Sukajaya berada di angka 43,58 pada tahun 2023 dan hanya sedikit meningkat menjadi 44,49 pada tahun 2024. Sukamakmur, dengan skor 49,61 pada tahun 2023, juga hanya mengalami sedikit perbaikan menjadi 54,62 pada tahun 2024. Perbedaan signifikan ini menunjukkan adanya disparitas pendidikan yang besar di dalam kabupaten, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor geografis, aksesibilitas, dan kondisi sosial-ekonomi. Wilayah-wilayah ini, yang cenderung berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mungkin menghadapi kendala dalam hal akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai, kekurangan tenaga pengajar berkualitas, dan rendahnya partisipasi pendidikan akibat faktor ekonomi.



Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 6. Nilai Indeks Pendidikan 40 Kecamatan Tahun 2023-2024

Secara keseluruhan, rata-rata indeks pendidikan Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari 63,01 pada tahun 2023 menjadi 64,93 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh di wilayah ini. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan pemerataan pendidikan. Kesenjangan yang cukup besar antara kecamatan dengan skor IP tinggi seperti Cibinong dan Gunung Putri, dan kecamatan dengan skor IP rendah seperti Sukajaya dan Sukamakmur, menunjukkan perlunya intervensi yang lebih strategis dan terfokus pada wilayah-

wilayah tertinggal.

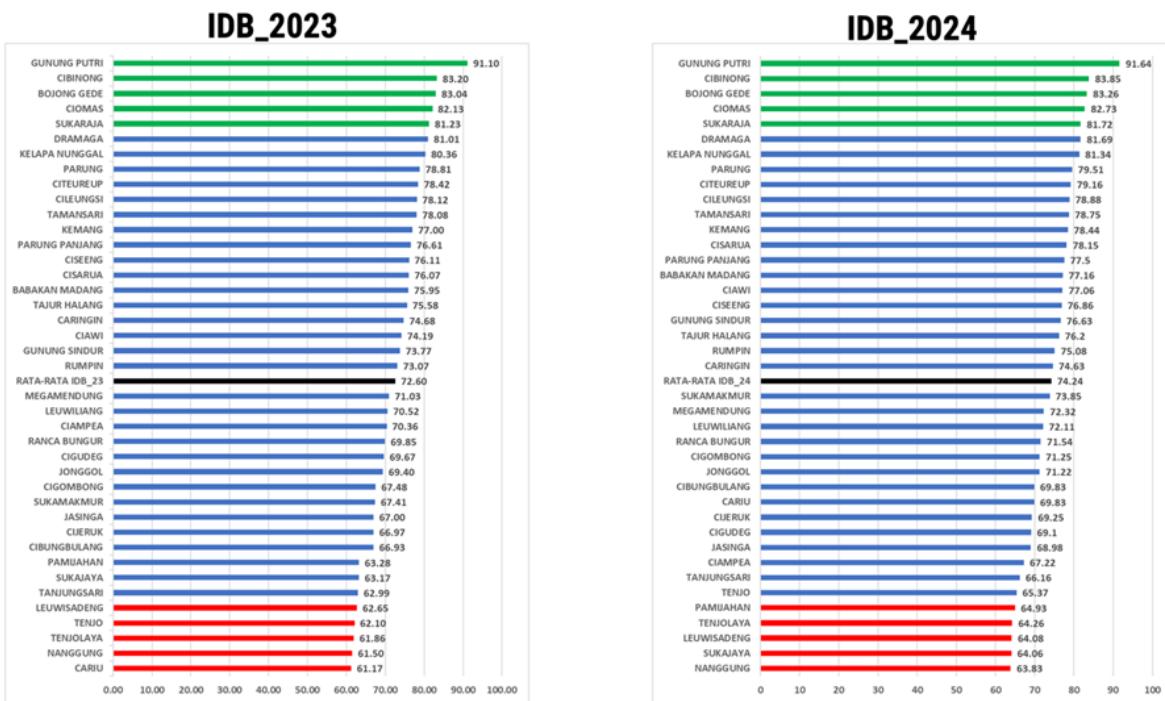
Upaya untuk meningkatkan indeks pendidikan di kecamatan-kecamatan dengan skor rendah harus mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan fasilitas fisik seperti sekolah yang layak, peningkatan kualitas dan jumlah tenaga pengajar, hingga program-program yang mendorong partisipasi pendidikan masyarakat. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk menjangkau wilayah terpencil, misalnya melalui pembelajaran jarak jauh atau program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan pendidikan di daerah-daerah yang tertinggal.

i) *Perbandingan Nilai Indeks Daya Beli Tahun 2023-2024*

Berdasarkan analisis Indeks Daya Beli (IDB) Kabupaten Bogor pada tahun 2023 dan 2024, terlihat adanya kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kecamatan dengan skor IDB tinggi dan rendah. Kecamatan Gunung Putri menempati peringkat tertinggi dengan skor 91,10 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 91,64 pada tahun 2024, diikuti oleh Cibinong, Bojong Gede, dan Ciomas yang juga memiliki skor di atas 80. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan tersebut memiliki akses yang baik terhadap infrastruktur, peluang kerja, dan pusat kegiatan ekonomi, yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki daya beli yang lebih tinggi. Posisinya yang strategis, baik sebagai kawasan industri maupun pusat aktivitas ekonomi, menjadikan kecamatan-kecamatan ini sebagai wilayah dengan perekonomian yang stabil dan terdiversifikasi. Urbanisasi, investasi infrastruktur, serta kehadiran lapangan kerja formal yang luas menjadi faktor utama yang mendorong tingginya daya beli masyarakat di wilayah ini.

Sebaliknya, kecamatan dengan IDB rendah seperti Nanggung, Sukajaya, Leuwisadeng, dan Cariu menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, dengan skor jauh di bawah rata-rata kabupaten, yaitu 74,24 pada tahun 2024. Kecamatan Nanggung, misalnya, hanya memiliki skor 61,50 pada tahun 2023 dan meningkat sedikit menjadi 63,83 pada tahun 2024. Kecamatan-kecamatan ini cenderung berada di wilayah terpencil, dengan akses infrastruktur yang terbatas, rendahnya diversifikasi ekonomi, dan ketergantungan pada sektor tradisional seperti pertanian subsisten. Minimnya investasi di wilayah ini, baik dari sektor publik maupun swasta, memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menghambat kemampuan masyarakat untuk bersaing di pasar kerja, sehingga mereka hanya dapat bekerja di sektor dengan produktivitas rendah dan pendapatan minim.

Rata-rata indeks daya beli Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari 72,60 pada tahun 2023 menjadi 74,24 pada tahun 2024, menunjukkan adanya perbaikan secara umum dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, disparitas yang signifikan antar kecamatan mengindikasikan bahwa pertumbuhan ini belum merata. Kecamatan dengan IDB tinggi telah berhasil memanfaatkan potensi ekonominya secara maksimal, sementara kecamatan dengan IDB rendah masih membutuhkan intervensi yang lebih kuat dan strategis. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu fokus pada peningkatan daya beli masyarakat di wilayah-wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur dasar, diversifikasi ekonomi lokal, pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan, serta insentif untuk menarik investasi di daerah terpencil.



Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 7. Nilai Indeks Daya Beli 40 Kecamatan Tahun 2023-2024

j) *Perbandingan Nilai IPM Tahun 2023-2024*

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor untuk tahun 2023 dan 2024, terlihat pola yang konsisten dengan kecamatan yang memiliki peringkat tinggi dan rendah. Kecamatan Gunung Putri terus memimpin dengan skor IPM tertinggi, yaitu 87,18 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 87,69 pada tahun 2024. Cibinong, Ciomas, dan Bojong Gede juga berada di peringkat atas dengan skor di atas 80, menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki kinerja baik dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Wilayah-wilayah dengan skor IPM tinggi memiliki keunggulan yang didukung oleh akses yang baik terhadap fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Kecamatan-kecamatan ini sering kali menjadi pusat kegiatan ekonomi atau memiliki infrastruktur yang memadai, yang mendorong kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan skor dari tahun ke tahun, meskipun kecil, mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam menjaga kualitas pembangunan manusia.

Sebaliknya, kecamatan seperti Sukajaya, Sukamakmur, Leuwisadeng, dan Pamijahan memiliki skor IPM yang jauh di bawah rata-rata kabupaten, yaitu 74,20 pada tahun 2024. Sukajaya, misalnya, mencatat skor terendah dengan 59,21 pada tahun 2023 dan hanya meningkat sedikit menjadi 60,13 pada tahun 2024. Skor rendah ini menunjukkan tantangan serius dalam akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya standar hidup akibat keterbatasan infrastruktur dan peluang ekonomi.

Kesenjangan yang signifikan antara kecamatan dengan skor IPM tinggi dan rendah mengindikasikan adanya disparitas pembangunan yang memerlukan perhatian serius. Wilayah-wilayah dengan skor rendah cenderung berada di daerah terpencil atau memiliki kondisi

geografis yang sulit dijangkau, yang memperburuk kesenjangan dalam distribusi layanan dasar. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan partisipasi tenaga kerja yang berkualitas juga menjadi faktor penghambat peningkatan IPM di wilayah ini.

Pendekatan yang lebih inklusif dan terfokus dapat meningkatkan aksesibilitas ke layanan dasar di wilayah dengan skor IPM rendah melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah. Program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan keterampilan kerja, dan beasiswa pendidikan juga perlu diintensifkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.2. Analisis Skalogram (Indeks Perkembangan Kecamatan/IPK) pada 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil analisis skalogram yang ditunjukkan pada tabel dan peta, Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) Kabupaten Bogor dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yaitu Indeks Fasilitas Pendidikan (IFP), Indeks Fasilitas Kesehatan (IFK), dan Indeks Fasilitas Ekonomi (IFE). Skor IPK menunjukkan tingkat perkembangan fasilitas di setiap kecamatan dan kapasitasnya untuk mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dari tabel tersebut, Kecamatan Gunung Putri memiliki skor IPK tertinggi (114,39), diikuti oleh Bojong Gede (72,31) dan Cibinong (125,91), yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang paling lengkap dan aksesibel dibandingkan kecamatan lainnya.

Kecamatan dengan skor IPK tinggi umumnya merupakan kawasan urban atau sub-urban dengan akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, transportasi, serta berbagai fasilitas dasar. Hal ini memberikan masyarakat di wilayah tersebut keuntungan dalam hal kualitas hidup dan produktivitas. Sebagai contoh, IFP Gunung Putri yang mencapai 30,48 mengindikasikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang sangat baik, seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. Selain itu, IFK (47,98) dan IFE (36,95) menunjukkan dukungan yang kuat dari sektor kesehatan dan ekonomi, seperti rumah sakit, klinik, pusat perdagangan, dan aktivitas ekonomi produktif lainnya.

Sebaliknya, kecamatan seperti Sukajaya, Sukamakmur, dan Tenjo memiliki skor IPK yang sangat rendah, masing-masing 16,13, 29,93, dan 27,77. Hal ini mencerminkan keterbatasan signifikan dalam akses terhadap fasilitas dasar. Misalnya, IFP Sukajaya hanya mencapai 4,10, menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan sangat terbatas di wilayah ini, kemungkinan hanya mencakup sekolah dasar dengan sedikit atau tanpa sekolah menengah. IFK dan IFE yang juga rendah di wilayah ini menunjukkan keterbatasan layanan kesehatan dan minimnya aktivitas ekonomi produktif, yang memperburuk ketertinggalan sosial-ekonomi.

Adanya disparitas yang signifikan antara kecamatan yang lebih berkembang di wilayah tengah dan utara Kabupaten Bogor dibandingkan kecamatan di bagian barat dan selatan yang cenderung lebih terpencil. Faktor geografis, seperti aksesibilitas jalan, transportasi, dan lokasi strategis, menjadi penentu utama tingkat perkembangan fasilitas. Kecamatan dengan jumlah fasilitas yang lebih banyak memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi dan memberikan layanan dasar yang memadai kepada penduduk.

| Kecamatan | IFP | IFK | IFE | IPK | JUMLAH JENIS FASILITAS |
|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|
| BABAKAN MADANG | 13.74580976 | 16.69563904 | 18.73667507 | 52.26722334 | 43 |
| BOJONG GEDE | 27.3222129 | 25.28850471 | 16.02497393 | 72.31280131 | 26 |
| CARINGIN | 19.034283 | 11.02751956 | 8.488557843 | 39.19362503 | 26 |
| CARIU | 3.99179307 | 8.713238599 | 6.065481533 | 20.8291336 | 26 |
| CIAMPEA | 18.20281529 | 17.7527859 | 17.86710859 | 57.15025464 | 26 |
| CIAWI | 9.077713626 | 13.01796769 | 20.24952037 | 45.71065667 | 27 |
| CIBINONG | 41.88853346 | 37.10915234 | 43.23297078 | 125.9067071 | 39 |
| CIBUNG BULANG | 16.32879816 | 13.94496518 | 14.05821424 | 47.73849762 | 36 |
| CIGOMBONG | 11.54445313 | 9.458011454 | 7.693471922 | 30.12553503 | 35 |
| CIGUDEG | 14.40105448 | 18.36670117 | 20.0758064 | 54.3029529 | 40 |
| CIJERUK | 7.37913723 | 8.204639481 | 8.637172039 | 30.1031248 | 32 |
| CILEUNGSING | 31.28479337 | 43.79016952 | 44.60252446 | 122.6802243 | 45 |
| CIOMAS | 11.96536164 | 22.15632202 | 15.42035398 | 52.85057706 | 37 |
| CISARUA | 7.84515772 | 11.909314 | 36.781733 | 57.3817013 | 39 |
| CISEENG | 12.95397957 | 12.32897398 | 13.58145905 | 41.32740562 | 39 |
| CITEUREUP | 21.06485027 | 29.21648103 | 30.0650478 | 82.8671876 | 45 |
| DRAMAGA | 6.983190384 | 13.95537311 | 12.13307691 | 36.14775148 | 36 |
| GUUNUNG PUTRI | 30.36348054 | 32.36320187 | 47.98537554 | 114.3941684 | 42 |
| GUUNUNG SINDUR | 11.46452076 | 12.54550643 | 10.21748448 | 36.69050769 | 37 |
| JASINGA | 6.756895402 | 12.84330342 | 13.93767933 | 35.639768302 | 33 |
| JONGGOL | 19.48863216 | 16.36230368 | 17.53039038 | 59.1480235 | 39 |
| KELAYANG NUNGGAL | 8.459038623 | 10.93628204 | 10.955005514 | 35.263455384 | 36 |
| KEMANG | 9.42916294 | 6.42916294 | 6.220086798 | 28.50823481 | 34 |
| LEUWILANG | 20.45166331 | 18.1641029 | 11.512639807 | 54.086052 | 39 |
| LEUWISADENG | 12.26245224 | 9.227479689 | 8.46548087 | 33.7259628 | 33 |
| ME GAMENDUNG | 9.1036161 | 10.9276884 | 16.3955918 | 38.75561463 | 37 |
| NANGGUNG | 7.43658196 | 11.51831878 | 7.83229796 | 29.35620603 | 31 |
| PAMJAHAN | 20.451916 | 13.79190328 | 19.91990018 | 59.702589 | 35 |
| PARUNG | 11.92370385 | 9.925999819 | 15.65938722 | 40.73573897 | 39 |
| PARUNG PANJANG | 11.83844054 | 16.6125267 | 20.14519259 | 51.33136193 | 37 |
| RANCABUNGUR | 4.950573309 | 8.796183604 | 4.262461402 | 21.10765489 | 29 |
| RUMPIN | 11.26573503 | 17.72140813 | 11.14984221 | 41.50235784 | 29 |
| SUKAJAYA | 4.105705231 | 9.072122545 | 2.955331408 | 16.13715918 | 20 |
| SUKAMAKMUR | 9.040097099 | 11.14034863 | 5.891269016 | 29.93179137 | 33 |
| SUKARAJA | 14.53061958 | 21.00676589 | 11.74264079 | 50.02297023 | 37 |
| TAJUR HALANG | 12.14659085 | 12.42229302 | 10.22998022 | 38.47597257 | 34 |
| TAMANSARI | 8.782639446 | 10.07456137 | 12.17338608 | 34.70670937 | 36 |
| TANJUNGSARI | 3.846165463 | 14.28643393 | 4.02005365 | 33.82876552 | 35 |
| TENJO | 6.012420643 | 6.216104362 | 4.881279559 | 20.99030685 | 26 |
| TENJOLAYA | 9.42096273 | 8.46107721 | 6.790579053 | 27.77025902 | 35 |

$$IPK = IFP + IFK + IFE$$

IPK = Indeks Perkembangan Kecamatan
IFP = Indeks Fasilitas Pendidikan
IFK = Indeks Fasilitas Kesehatan
IFE = Indeks Fasilitas Ekonomi



Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 8. Hasil Analisis Skalogram 40 Kecamatan Tahun 2024

4. PENUTUP

Secara umum, IPM Kabupaten Bogor terus menunjukkan tren positif, meningkat dari 67,83 pada tahun 2016 menjadi 74,24 pada tahun 2024. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari peningkatan pada indikator-indikator utama, seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mencapai 8,83 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai 12,79 tahun, Angka Harapan Hidup (AHH) yang meningkat menjadi 74,94 tahun, serta pengeluaran per kapita yang kini mencapai Rp13,211 juta. Capaian ini menjadi penanda bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membangun kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah memberikan dampak yang signifikan. Namun, keberhasilan ini masih dibayangi oleh tantangan yang cukup mendalam, terutama terkait dengan kesenjangan antar wilayah. Beberapa kecamatan seperti Gunung Putri mencatat IPM yang tinggi, yaitu mencapai 87,69, sementara wilayah seperti Sukajaya dan Leuwisadeng masih tertinggal dengan nilai IPM sekitar 60-an.

Hasil analisis skalogram menunjukkan perbedaan signifikan dalam tingkat perkembangan fasilitas di kecamatan-kecamatan Kabupaten Bogor, yang dihitung berdasarkan tiga komponen utama: Fasilitas Pendidikan (IFP), Fasilitas Kesehatan (IFK), dan Fasilitas Ekonomi (IFE). Kecamatan Gunung Putri memiliki skor IPK tertinggi (114,39), yang menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di wilayah ini sangat lengkap dan mudah diakses. Sebaliknya, kecamatan seperti Sukajaya, Sukamakmur, dan Tenjo memiliki skor IPK rendah (16,13, 29,93, dan 27,77), mencerminkan keterbatasan besar dalam akses fasilitas dasar. Faktor geografis seperti aksesibilitas transportasi dan lokasi strategis menjadi penentu utama disparitas ini, dengan kecamatan yang lebih berkembang terletak di wilayah tengah dan utara Kabupaten Bogor, sementara kecamatan di barat dan selatan cenderung lebih terpencil dan kurang berkembang. Ketersediaan fasilitas yang lebih banyak di wilayah yang lebih berkembang memberikan keuntungan dalam kualitas hidup dan produktivitas masyarakat setempat.

Berdasarkan temuan analisis, disarankan agar penelitian selanjutnya fokus pada strategi pengurangan kesenjangan antara kecamatan yang lebih maju dan yang tertinggal. Penelitian

lebih lanjut dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas fasilitas di wilayah terpencil, seperti perbaikan infrastruktur transportasi dan distribusi sumber daya yang lebih merata. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi lebih mendalam terkait efektivitas program pemerintah yang telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi kebijakan yang dapat mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di kecamatan yang memiliki skor IPK rendah, agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliu, M. A., Fitrianto, A., & Erfiani, E. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Menggunakan Model Regresi Logistik Biner. *Jurnal Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Terapannya*, 3(1), 15–25.
- Alwi, W., & Musfirah, M. (2018). Penerapan Regresi Nonparametrik Spline dalam Memodelkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM di Indonesia. *Jurnal MSA (Matematika Dan Statistika Serta Aplikasinya)*, 9(2), 112–119.
- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*.
- Matulessy, R., E., Puspa, & G., F. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat Menggunakan Regresi Linier Berganda. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 422–429.
- Primandhana, P., W., Dewi, S., K., Wahed, & M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekuil*, 3(4), 834–847.
- Ravallion, M. (2012). Troubling tradeoffs in the human development index. *Journal of Development Economics*, 99, 201–209.
- Sudarno, S., Nurmala, R., & Ispriyanti, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM Menggunakan Regresi Logistik Ordinal dan Probit Ordinal. *Jurnal Gaussian*, 6(1), 111–120.
- UNDP. (1990). *Human Development Report 1990*. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1990encompletenostats.pdf>
- Utomo, Y. P., & Nugroho, M. F. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Masyarakat, Jumlah Uang Beredar, serta Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 6(2), 822–825.
- Aliu, M. A., Fitrianto, A., & Erfiani, E. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Menggunakan Model Regresi Logistik Biner. *Jurnal Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Terapannya*, 3(1), 15–25.
- Alwi, W., & Musfirah, M. (2018). Penerapan Regresi Nonparametrik Spline dalam Memodelkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM di Indonesia. *Jurnal MSA (Matematika Dan Statistika Serta Aplikasinya)*, 9(2), 112–119.
- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*.
- Matulessy, R., E., Puspa, & G., F. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat Menggunakan Regresi Linier Berganda. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 422–429.
- Primandhana, P., W., Dewi, S., K., Wahed, & M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekuil*, 3(4), 834–847.
- Ravallion, M. (2012). Troubling tradeoffs in the human development index. *Journal of*

- Development Economics*, 99, 201–209.
- Sudarno, S., NurmalaSari, R., & Ispriyanti, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM Menggunakan Regresi Logistik Ordinal dan Probit Ordinal. *Jurnal Gaussian*, 6(1), 111–120.
- UNDP. (1990). *Human Development Report 1990*.
<https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1990encompletenostats.pdf>
- Utomo, Y. P., & Nugroho, M. F. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Masyarakat, Jumlah Uang Beredar, serta Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 6(2), 822–825.